

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hasil pembahsasan tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan , sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo sudah dilaksanakan. Pihak Pemerintah Indonesia sudah melakukan pemulihan yang efektif terhadap korban penggusuran bandara baru dengan cara pemberian ganti rugi sesuai *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 8. Pemerintah Indonesia melaksanakan Pasal 19 *Universal Declaration Of Human Rights* adanya sosialisasi dan dialog antara warga terdampak dengan Pemerintah Indoneisa sebelum diterbitkannya Ijin Penetapan Lokasi (IPL), Pemerintah Indonesia juga memberikan lapangan pekerjaan yang baru bagi warga terdampak pembangunan bandara baru sesuai dengan Pasal 23 *Universal Declaration Of Human Rights*.

Disatu sisi , belum terpenuhinya implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 *Universal Declaration Of Human Rights* ketika proses penggusuran warga terdampak pembangunan bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo karena masih ada kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum karena masih menggunakan cara-cara

kekerasan dalam pengambilan paksa rumah warga dengan menggunakan alat berat dan penghancuran rumah yang merupakan harta milik warga di lokasi pembangunan bandara baru. Kurangnya implementasi pada Pasal 25 Ayat 1 *Universal Declaration Of Human Rights* karena masih ada warga terdampak pembangunan bandara baru di Kulon Progo belum mendapatkan tempat relokasi gratis yang layak sesuai janji pemerintah.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari pemerintah terhadap pengimplementasian *Universal Declaration Of Human Rights* agar secara khusus lebih memperhatikan semangat Hak Asasi Manusia dalam proses penggusuran yang dilakukan pada lokasi pembangunan bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.
2. Lembaga yang berwenang hendaknya mengedepankan semangat Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya.
3. Warga masyarakat terdampak pembangunan bandara baru di Kulon Progo hendaknya menjunjung tinggi ketertiban sesuai hukum yang berlaku agar tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dan menyadari pentingnya menyuarkan Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* sebagai dasar yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arini, Titis Edi, 1996, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Beriansyah, 1993, *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia Edisi Kedua*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Budiharjo, Miriam, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Masyhur, 1993, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2000)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, 2005, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional Melindungi Orang-orang Yang Menjadi Perhatian UNHCR dalam Modul Pembelajaran Mandiri*, Switzerland : Departemen Perlindungan Internasional, UNHCR.
- Kunarto, 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakkan Hukum*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Penerbit Omba.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40 Tahun 1985.

Jurnal

Firdiansyah, 2016, "Peran dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu", *Jurnal HAM* , Vol. 13, Tahun 2016, Komnas HAM.

Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, 2017, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *Rule Of Law* : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 , Nomor 1. 25 November 2017, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia.

Internet

Arthur Gideon, Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta Sudah 93 Persen, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3940397/pembangunan-bandara-baru-yogyakarta-sudah-93-persen>, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019.

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/universal> diakses pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019.

CNN Indonesia, Jokowi Targetkan Bandara Baru Yogyakarta Selesai Desember, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190829152041-92-425824/jokowi-targetkan-bandara-baru-yogyakarta-selesai-desember>, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, <http://hubud.dephub.go.id/> diakses pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo, <http://dpad.jogjapro.go.id/article/news/view/sejarah-singkat-kabupaten-kulon-progo-1485> diakses pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/gusur> diakses pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Komentar Umum Nomor 7 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak : Pengusiran Paksa pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-nomor-6-tentang-hak-atas-tempat-tinggal-yang-layak-pengusiran-paksa-pada-komentar-umum-kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-icescr/> diakses pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019.

Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/declaration> diakses pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019.

Sukma Indah Permana, Saat Komnas HAM Sebut Catatan Buruk di Proyek Bandara Kulon Progo, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4166760/saat-komnas-ham-sebut-catatan-buruk-di-proyek-bandara-kulon-progo>, diakses 11 April 2019 Pukul 13.25 WIB.

Wishnugroho Akbar dan Arif Hulwan, Warga Kulon Progo Tantang Buldoser Lawan Penggusuran, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180725170948-20-316949/warga-kulon-progo-tantang-buldoser-lawan-penggusuran>, diakses 17 September 2019.

Zaenal Abidin, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>, diakses 16 Oktober 2019.

Wawancara

Agus Hidayat selaku Sekretaris Camat Kecamatan Temon di Kulon Progo, pada tanggal 20 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

Budi Hermawan selaku Kepala Bidang Advokasi di Lemabaga Bantuan Hukum Yogyakarta, pada tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 15.00 WIB.